

## **Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Pemerintah Provinsi Papua**

**Muhammad Bayu Dermawan Sarfa, Abdul Rasyid, Muhammad Ridwan Rumasukun,  
Zakaria, Yaya Sonjaya**

### **ABSTRAK**

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber penerimaan murni daerah. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Penelitian ini merupakan penelitian kausal yang bertujuan menganalisa hubungan sebab akibat antara variabel independen ( yakni pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum ) serta variabel dependen (belanja modal) ata yang digunakan adalah laporan keuangan Kabupaten/Kota Provinsi Papua pada tahun 2016, 2018, dan 2020. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten yang terdapat di Provinsi Papua yakni sebanyak 29 Kabupaten sehingga total populasi adalah  $29 \times 3 = 87$  data. Analisis data menggunakan regresi linier berganda yang meliputi uji F secara simultan, uji t secara parsial, dan uji determinasi R

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja modal. Hal ini diindikasikan oleh nilai  $F_{hitung} (74.836) > F_{tabel} (2.70)$  dan  $sig-p (0.000) < 0.05$ . Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja modal. Hal ini diindikasikan oleh nilai  $t_{hitung} X_1 (4.915) > t_{tabel} (1.98)$  dan  $p-value (0.000) < 0.05$ . Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja modal. Hal ini diindikasikan oleh nilai  $t_{hitung} X_2 (7.064) > t_{tabel} (1.98)$  dan  $p-value (0.000) < 0.05$ . Besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal adalah sebesar 63.2%. Disarankan agar Balai Pengelolaan Modal dan Pajak Retribusi Daerah agar dapat memberi kemudahan berupa informasi laporan keuangan sehingga aktifitas penelitian yang dilaksanakan oleh kalangan mahasiswa dapat lebih dipermudah.

***Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal***

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Alokasi belanja modal pemerintah daerah perlu dilakukan secara efektif agar tujuan pembangunan terealisasi secara terkontrol. Belanja modal merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang dapat mengakibatkan berkurangnya nilai ekuitas dana sebagai kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran serta tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Hal ini sesuai dengan pemberlakuan Undang-undang No.33 tahun 2004 tentang

perimbangan keuangan pusat dan daerah yang membawa perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintah daerah. Faktor tenaga kerja tidak dapat diabaikan dalam suatu perusahaan karena merupakan faktor kunci, sebab kesalahan dan kekeliruan yang terjadi dapat menyebabkan hambatan-hambatan yang serius, bahkan dapat menyebabkan kegagalan total. Oleh karena itu dibutuhkan pembinaan karir para karyawan agar dapat memberikan kepuasan kerja pada setiap individu karyawan yang dapat berakibat pada peningkatan prestasi kerja bagi

kepentingan organisasi. Oleh karenanya, kesejahteraan yang perlu dikembangkan bukan hanya bagi tenaga kerja sendiri tetapi juga bagi keluarganya dalam arti luas, yang harus tetap terpelihara termasuk pada saat tenaga kerja kehilangan sebagian atau seluruh penghasilannya sebagai akibat terjadinya resiko-resiko sosial antara lain kecelakaan kerja, sakit, meninggal dunia dan hari tua.

Pada umumnya organisasi selalu bertujuan untuk mencapai keuntungan tertentu dengan biaya minimal. Untuk dapat menjalankan kegiatan perusahaan sesuai dengan rencana sangat diperlukan berbagai macam faktor produksi yang antara lain terdiri dari modal, tenaga kerja, sumber alam dan keahlian. Agar tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi dapat tercapai maka organisasi harus dapat mengelola faktor-faktor tersebut secara efektif dan efisien.

Pemberlakuan Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, membuktikan bahwa dalam mengalokasikan belanja modal daerah, pemerintahan daerah otonom harus memiliki komitmen kuat untuk mengalokasikan belanja modal daerah yang meliputi sumber-sumber penerimaan daerah seperti sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan/ bantuan, serta penerimaan pembangunan. Untuk menjamin sumber keuangan daerah otonom, pemerintah harus menjamin perimbangan keuangan pusat dengan daerah (Wardi, 2010).

Otoritas daerah memungkinkan penggunaan semua dana perimbangan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Namun pemerintah daerah harus menggunakan transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Perimbangan tersebut secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan standar pelayanan publik minimum serta disajikan

secara transparan dan akuntabel (Maimunah, 2009).

Pentingnya pengalokasian belanja modal daerah adalah karena proporsi belanja modal harus sebanding dengan total belanja (Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung). Proporsi ini bisa dikatakan sebagai indikator political will (keseriusan) pemerintah dalam menentukan proporsi belanja modal yang diperuntukkan untuk pelayanan publik. Anggaran suatu daerah sangat mungkin memiliki angka nominal yang tinggi dibanding daerah lain, namun jika dibandingkan dengan total belanja, proporsinya sangat mungkin lebih rendah.

Alasan memilih judul penelitian adalah masih ditemukan beberapa ketidakkonsistenan (gap) diantara hasil penelitian terdahulu, dimana ada penelitian yang mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten/kota, tetapi ada juga penelitian yang mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2016-2020?
2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja modal Kabupaten di Provinsi Papua Tahun 2016-2020?
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh secara simultan terhadap Belanja

modal Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2016-2020?

### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2016-2020
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh parsial Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2016-2020
3. Untuk menganalisis pengaruh simultan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2016-2020

### D. Manfaat Penelitian

Mengacu pada tujuan penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian, yaitu :

1. Bagi peneliti, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman kepada peneliti mengenai bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap Kabupaten/Kota Provinsi Papua. Dan sebagai suatu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan sarjana.
2. Bagi para akademisi, Penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap akuntansi sektor publik dan dapat memberi masukan dalam perkembangan akuntansi sektor publik.
3. Bagi peneliti selanjutnya, Penelitian ini dapat dijadikan acuan guna penelitian lanjutan.

## Landasan Teori

### A. Pengertian Belanja Modal

Belanja daerah atau belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Soemitro 2008).

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2011, belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Sedangkan menurut PSAP Nomor 2, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Selanjutnya pada pasal 53 ayat 2 Permendagri Nomor 59 Tahun 2012 ditentukan bahwa nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

### B. Sumber Belanja Modal

Menurut Undang-Undang No. 58 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan

tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

1) Belanja Tidak Langsung (BTL) Kelompok BTL adalah merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain; belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan social, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

2) Belanja Langsung (BL).

Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun bersangkutan yang mengurangi kekayaan pemerintah daerah. Dalam struktur anggaran daerah dengan pendekatan kinerja, pengeluaran daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, kelompok dan jenis belanja. Belanja daerah menurut organisasi adalah suatu kesatuan penggunaan seperti sekretariat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah lainnya. Fungsi belanja misalnya pendidikan, kesehatan dan fungsi-fungsi lainnya (Syafrudin 2010:43)

### **C. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah. PAD yang tinggi merupakan impian yang harus diperjuangkan oleh setiap daerah untuk mencapainya (Mardiasmo, 2012).

Pendapatan ini merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim 2008). Pendapatan Daerah sesuai UU No.33 Tahun 2004 Pasal 1 adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun

bersangkutan. Menurut UU No. 25 tahun 1999, PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari potensi sumber daya yang ada di daerah.

kepada pimpinan dan orang yang dinilai untuk secara bersama membahas perilaku kerja dari yang dinilai. Pada umumnya setiap orang menginginkan dan mengharapkan umpan balik mengenai prestasi kerjanya. Penilaian memungkinkan bagi penilai dan yang dinilai untuk secara bersama membahas kekurangan-kekurangan yang terjadi dan mengambil langkah perbaikannya.

### **D. Pengertian Dana Alokasi Umum**

Menurut Bastian (2011), Dana Alokasi Umum adalah dana perimbangan dalam rangka untuk pemerataan kemampuan keuangan antar- daerah. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai 31 kebutuhan pembelanjaan. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar, dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai (Halim 2008).

Menurut UU No. 33 tahun 2012, DAU adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD-nya. DAU bersifat “Block Grant” yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan

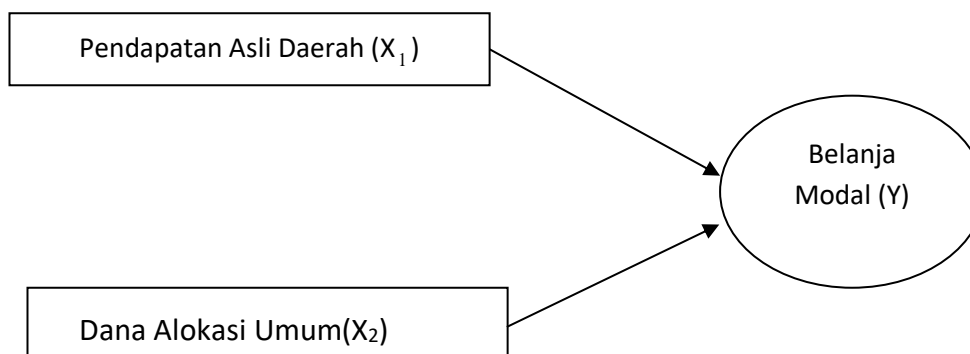
kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ).

#### **E. Model Penelitian Empirik**

##### **Kerangka Berpikir**

Untuk memperjelas maksud penelitian dalam memahami serta perlu dijelaskan kerangka pemikiran dapat digambarkan dibawah ini seperti berikut :

**Gambar Model Penelitian Empirik  
(Kerangka Berpikir)**



### A. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Arikunto, Suharsimi, 2002).

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. (H<sub>1</sub>): ada pengaruh parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja modal.
2. (H<sub>2</sub>): ada pengaruh parsial Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja modal.
3. (H<sub>3</sub>): ada pengaruh simultan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja modal.

### METODE PENELITIAN

#### Populasi Dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten yang terdapat di Provinsi Papua yakni sebanyak 29 Kabupaten sehingga total populasi adalah  $29 \times 3 = 87$ .

### TEKNIK ANALISA DATA

#### A. Teknik Analisis

#### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas yang dilakukan pada regresi berganda dilakukan untuk mengetahui apakah residual model regresi yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan program SPSS. Data terdistribusi normal jika  $p > 0,05$  (Ghozali, 2013).

#### 2. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas terjadi ketika ada hubungan yang kuat antara dua atau lebih prediktor di dalam model regresi. Jika terjadi kolinieritas yang tinggi antara prediktor, maka estimasi yang tepat dari koefisien regresi tidak mungkin didapatkan. Salah satu cara untuk melihat multikolinieritas adalah dengan menggunakan Variance Inflation Factor (VIF). VIF mengindikasikan apakah suatu prediktor memiliki hubungan linear yang kuat dengan prediktor lainnya. Jika nilai tolerance pada  $VIF \geq 0,1$  dan  $VIF < 10$  berarti tidak terjadi multikolinieritas antarvariabel bebas (Ghozali, 2013).

#### 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali 2013). Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan Uji Glejser (Ghozali 2013). Pada Uji Glejser, nilai residual absolut diregresi dengan variabel independen. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka terdapat indikasi terjadi Heteroskedastisitas.

#### 4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Apabila terjadi korelasi, kemungkinan terdapat masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain (Ghozali, 2013).

#### 5. Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini, uji hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda. Menurut Sugiyono (2010) analisis regresi ganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, jika dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi. Model analisis ini dipilih karena penelitian ini dirancang untuk meneliti variabel bebas yang berpengaruh terhadap variabel tidak bebas. Persamaan regresi berganda yang dapat digunakan dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Y = Belanja Modal (BM)

$\beta_0$  = konstanta

$X_1$  = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

$X_2$  = Dana Alokasi Umum (DAU)

$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_5$  = koefisien regresi

e = epsilon

#### B. Pengujian Hipotesis

##### 1. Uji t

Untuk membuktikan bahwa pendidikan dan pelatihan, motivasi, insentif dan lingkungan kerja secara parsial (sendiri – sendiri) mempengaruhi kinerja Pegawai IPDN Kampus Papua digunakan uji t – statistic (Kuncoro, 2003). Adapun tahapan pengujiannya adalah sebagai berikut :

1) Membuat formulasi hipotesis

$H_0 : b = 0$  (hipotesis nihil)

Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel independent (X) terhadap variabel dependen (Y).

$H_a : b \neq 0$  (hipotesis alternatif)

Artinya pada pengaruh yang signifikan dari variabel independent (X) terhadap variabel dependen (Y).

2) Menentukan level of significant dengan t – table

3) Menghitung nilai t – statistic dengan rumus :  $H_0 : b = 0$  (Variabel bebas tidak berpengaruh signifikan dengan variabel terikat). (Motivasi, disiplin, Lingkungan kerja terhadap kinerja Kerja )

$H_a : b \neq 0$  (Variabel bebas berpengaruh signifikan dengan variabel terikat) (Motivasi, Disiplin, Lingkungan Kerja terhadap Kinerja kerja), untuk menentukan nilai statistik tabel, ditentukan dengan tingkat signifikansi 5 % dengan derajat/ degree of freedom  $df = (n - k - 1)$  dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel.

Jika t hitung > dari t table maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak demikian pula sebaliknya Jika t hitung < dari t table  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

##### 2. Uji f (Uji Simultan)

Uji F digunakan untuk membuktikan bahwa aspek pendidikan dan pelatihan, motivasi, insentif dan lingkungan kerja bersama – sama mempengaruhi kinerja karyawan Pegawai IPDN Kampus Papua digunakan uji F- Statistik (Gujarati, 1999 :

46). Adapun tahapan pengujiannya adalah sebagai berikut :

- a. Membuat formulasi hipotesis
- b. Menentukan level of significant dengan F – table.

c. Mencari f-hitung 
$$\frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R )

Analisa koefisien determinasi digunakan untuk menentukan besarnya variasi dari kinerja yang dapat diterangkan oleh variabel pendidikan dan pelatihan, motivasi, insentif dan lingkungan kerja serta kinerja Pegawai IPDN Kampus Papua.

Koefisien determinasi dilambangkan dengan R merupakan proporsi hubungan

antara Y dengan X. Nilai koefisien determinasi adalah diantara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai R yang kecil berarti kemampuan variabel – variabel independent dalam menjelaskan variabel dependen amat kecil. Nilai yang mendekati hamper semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksikan variasi variabel – variabel independent. R dapat dinyatakan dengan bacaan sebagai berikut :

$$R^2 = \frac{\{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)\}^2}{\{n \sum x^2 - (n \sum x^2)\} \{n \sum y^2 - (\sum y)^2\}}$$

X : Skor pernyataan

Y : Skor total

(Gujarati,1999: 46)

## Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.583	2.005		1.787	.078
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	.454	.092	.375	4.915	.000
	Dana Alokasi Umum (DAU)	.382	.054	.539	7.064	.000

Tabel 1. memperlihatkan bahwa nilai t-hitung  $X_1$  (Pendapatan Asli Daerah (PAD) =4.915 dengan signifikansi (p-value) sebesar 0.000. Jika dibandingkan dengan nilai t-tabel = 1.98 (untuk N=ke87 atau df=84) dan sig-□ =0.05, dapat diketahui bahwa t-hitung  $X_1$  (4.915) > t-tabel (1.98) dan p-value (0.000) <0.05. Hasil analisis ini memenuhi persyaratan uji hipotesis dimana jika t-hitung > t-tabel dan p-value < 0.05, berarti  $H_a$  diterima atau  $H_o$  ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel  $X_1$  (Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberi pengaruh signifikan terhadap variabel terikat Y (Belanja modal).

Tabel 1. Juga memperlihatkan bahwa nilai t-hitung  $X_2$  (Dana Alokasi Umum

(DAU) =7.064 dengan signifikansi (p-value) sebesar 0.000. Jika dibandingkan dengan nilai t-tabel = 1.98 (untuk N=ke87 atau df=84) dan sig-□ =0.05, dapat diketahui bahwa t-hitung  $X_2$  (7.064) > t-tabel (1.98) dan p-value (0.000) <0.05. Hasil analisis ini memenuhi persyaratan uji hipotesis dimana jika t-hitung > t-tabel dan p-value < 0.05, berarti  $H_a$  diterima atau  $H_o$  ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel  $X_2$  (Dana Alokasi Umum (DAU) memberi pengaruh signifikan terhadap variabel terikat Y (Belanja modal).

Uji determinasi R dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas (Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU), terhadap



variabel terikat (Belanja modal) dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 2  
Uji Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.800 <sup>a</sup>	.641	.632	.36202

Tabel 2. memperlihatkan bahwa nilai Adjusted R square adalah 0.632 sehingga dapat disimpulkan bahwa besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat (Belanja modal) adalah sebesar  $0.632 \times 100\% = 63.2\%$ . Hal ini berarti bahwa sebesar 63.2% variabel terikat (Belanja Modal) dapat dijelaskan oleh variabel bebas selebihnya yakni sebesar 36.8% dijelaskan oleh faktor faktor lain yang tidak diteliti.

#### Persamaan Regresi

Persamaan regresi dapat disusun sesuai dengan nilai koefisien hasil perhitungan berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 3.583 + 0.454X_1 + 0.382X_2 + e$$

Bentuk persamaan ini berarti bahwa jika faktor lain dianggap tetap, maka setiap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1 point akan dapat meningkatkan Belanja Modal sebesar 3.583 + 0.453 point. Demikian seterusnya untuk variabel lainnya setiap peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 1 point, dapat meningkatkan belanja modal sebesar 3.583 + 0.382 point.

### Hasil dan Pembahasan

#### 1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal

Hasil uji-t secara parsial bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberi pengaruh signifikan terhadap Belanja modal. Hal ini diindikasikan oleh nilai t-hitung  $X_1 (4.915) > t\text{-tabel} (1.98)$  dan p-value  $(0.000) < 0.05$ . Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Titik, 2016, Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap

Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur dimana hasil penelitian membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Priambudi, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa tahun 2013 dimana hasil penelitian membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap Belanja Modal, ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi ( $R_1, 2y$ ) sebesar 0,912; koefisien determinasi ( $R^2 1,2y$ ) 0,832;

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan

sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Pendapatan Asli Daerah ini sekaligus dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak Pendapatan Asli Daerah yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada Pemerintah Pusat yang berarti ini menunjukkan bahwa daerah tersebut telah mampu untuk mandiri, dan begitu juga sebaliknya. Karena dengan adanya peningkatan PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah, sehingga pemerintah dapat memberikan kualitas pelayanan publik dengan baik.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Setiap daerah berbekal kemampuan keuangan yang beragam dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya, oleh karena itu untuk mengatasi ketimpangan fiskal pemerintah pusat mengalokasikan dana yang bersumber kepada APBN untuk

mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah (Halim, 2004). Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (UU No. 33/2004). Kemandirian dalam APBD sangat terkait dengan kemandirian PAD, sebab semakin besar sumber pendapatan dari potensi daerah, bukan pendapatan dari bantuan, maka daerah akan semakin leluasa untuk mengkomodasikan kepentingan masyarakat tanpa muatan kepentingan Pemerintah Pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah (Soekarwo, 2003). Pendapatan Asli Daerah menurut Putro dan Pamudji (2010) dapat dirumuskan sebagai berikut:  $PAD = Pajak\ Daerah + Retribusi\ Daerah + Laba\ Perusahaan\ Daerah + Pendapatan\ Lain-lain\ yang\ Sah$

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang dipergunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya. Belanja modal daerah mencakup belanja modal untuk pemerolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan asset tak berwujud.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar, menjelaskan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, serta melebihi batasan

minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Secara teoritis terdapat tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yaitu dengan cara menukar dengan aset tetap lain, membangun sendiri, dan membeli. Aset tersebut dipergunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari suatu satuan kerja dan bukan untuk diperjual belikan. Menurut Putro dan Pamudji (2010) indikator belanja modal dapat diukur dengan:  $Belanja\ modal = Belanja\ tanah + belanja\ peralatan\ dan\ mesin + belanja\ gedung\ dan\ bangunan + belanja\ jalan,\ irigasi\ dan\ jarangan + belanja\ aset\ lainnya.$

## **2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal**

Hasil uji-t secara parsial bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memberi pengaruh signifikan terhadap Belanja modal. Hal ini diindikasikan oleh nilai t- hitung  $X_2 (7.064) > t\text{-tabel} (1.98)$  dan  $p\text{-value} (0.000) < 0.05$ . Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Gani, 2013, Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Khusus Terhadap Belanja modal Pada Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera dimana hasil penelitian membuktikan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memberi pengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Akhmad Imam Amrozi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, 2015, Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap

Alokasi Belanja Pemerintah Daerah dimana hasil pengujian empiris menunjukkan hasil DAU dan PAD berpengaruh positif terhadap alokasi belanja pegawai, tetapi untuk belanja modal berpengaruh negatif.

Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum, dengan mengalokasikan DAU untuk alokasi belanja modal. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) hasil penelitiannya mengemukakan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU untuk suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. DAU bersifat Block Grant, yakni hibah yang penggunaannya cukup fleksibel (dalam artian tidak banyak larangan) seperti halnya hibah kategori. Walidi (2009) menyatakan bahwa DAU juga berfungsi sebagai equalization grant yang menetralkan ketimpangan keuangan karena adanya dana bagi hasil yang diterima daerah. Dana Alokasi Umum adalah salah satu dana perimbangan dari pemerintah yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keteradilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004). Dengan adanya transfer dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah mampu mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai Belanja Modal di daerahnya. Namun pada kenyataannya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari atau belanja modal. Belanja Modal merupakan bagian

dari belanja modal yang juga didanai dari DAU, dan diperhitungkan oleh pemerintah daerah dalam APBD

### **3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal**

Hasil penelitian membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) memberi pengaruh signifikan terhadap Belanja modal. Hal ini diindikasikan oleh nilai F-hitung ( $74.836$ ) > F-tabel ( $2.70$ ) dan sig-p ( $0.000$ ) <  $0.05$ . Hasil penelitian ini sejalan dengan Erlina Tiara Intan Sari, 2016, Pengaruh PAD, DAU, DAK, DAN DBH terhadap belanja modal (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur) dimana hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa:

- 1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja modal.
- 2) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja modal.
- 3) Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja modal.
- 4) Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja modal.

Anggaran Daerah yang dapat disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja modal (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dengan DPRD harus berupaya secara nyata guna untuk menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat secara riil sehingga tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik dapat terpenuhi.

Daerah yang berada di wilayah Republik Indonesia tidak dapat terlepas dari adanya peran dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal menjalankan fungsi pemerintahan yang ada pada di setiap

daerah. Namun, dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang berlaku pada setiap daerah di wilayah Republik Indonesia menjadikan pemerintah daerah memiliki pelimpahan kewenangan dengan cakupan luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri serta meminimalisir campur tangan pemerintah pusat. Dengan cakupan tersebut, pemerintah daerah dapat mempermudah dalam mengatur segala kas milik daerah untuk dipergunakan dalam public service di daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam Belanja Modal dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Pemerintah daerah, bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif terlebih dahulu menentukan Kebijakan

Umum APBD (KUA) dan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai petunjuk (guidance) dalam pengalokasian sumber daya dalam APBD. KUA dan PPAS merupakan konkretisasi dari hasil penjarangan aspirasi masyarakat sehingga diperoleh gambaran yang cukup tentang kebijakan jangka pendek, jangka menengah, dan kebijakan jangka panjang yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam APBD untuk menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Anggaran Belanja Modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Pada dasarnya, pemerintah tidak mempunyai uang yang dimiliki sendiri, sebab seluruhnya adalah milik publik (Mardiasmo, 2002:67), oleh karena itu dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah

daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Juli Panglima Sarangih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan,

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Permendagri No. 27 tahun 2013 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Belanja Modal sangat berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari Belanja Modal tersebut. Dari konsep Multi-Term Expenditure Framework (MTEF) menyatakan bahwa kebijakan Belanja Modal harus memperhatikan kemanfaatan (usefulness) dan kemampuan keuangan pemerintah daerah (budget capability) dalam pengelolaan aset tersebut dalam jangka panjang (Allen dan Tommasi, 2001)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Menurut Mardiasmo (2002) saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait upaya meningkatkan penerimaan daerah, keterbatasan sarana dan prasarana untuk investasi menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya PAD terhadap Belanja Modal, apakah karena PAD yang rendah atau alokasi yang kurang tepat.

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 53 menyatakan bahwa Belanja Modal digunakan untuk

pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam Belanja Modal hanya sebesar harga beli/bangun aset.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal kabupaten/ kota Provinsi Papua, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja modal. Hal ini diindikasikan oleh nilai F-hitung (74.836) > F-tabel (2.70) dan sig-p (0.000) < 0.05.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja modal. Hal ini diindikasikan oleh nilai nilai t-hitung X1 (4.915) > t-tabel (1.98) dan p-value (0.000) < 0.05.
3. Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja modal. Hal ini diindikasikan oleh nilai t-hitung X2 (7.064) > t-tabel (1.98) dan p-value (0.000) < 0.05
4. Besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal adalah sebesar 63.2%.

### B. Saran

1. Mengingat sulitnya mendapatkan informasi tentang laporan keuangan yang sangat diperlukan dalam

penelitian ini, maka dengan ini penulis menyarankan agar dapat memberi kemudahan berupa informasi laporan keuangan sehingga aktifitas penelitian yang dilaksanakan oleh kalangan mahasiswa dapat lebih dipermudah.

2. Kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian sejenis dengan menambah variabel lain sehingga diperoleh hasil penelitian yang dijadikan sebagai referensi pembandingan terhadap penelitian terdahulu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Allen, Richard dan Daniel Tommasi, 2001. *Managing Public Expenditure: A Reference Book for Transition Countries*, Paris: SIGMA-OECD.
- Bastian, I. 2011. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Pengembangan Akuntansi UGM.
- Bawono, Bernando Gatot Tri. 2008. "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah." Skripsi Tidak Dipublikasikan. Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Darwanto dan Yustikasari, Yulia. 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. SNA X.
- Erlina, Rasdianto, 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*, Medan: Brama Ardian.

- Erlina. 2007. Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatra Utara. *Jurnal Akuntansi* 20. Jakarta: Salemba Empat. -----
- Erlina, 2011. *Metodologi Penelitian*, USU Press, Medan
- Ginting, Evarina, 2013. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Desentralisasi Fiskal sebagai Variabel Moderating di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara, Tesis Program Pasca Sarjana USU, Medan.
- Gani. 2013. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Khusus terhadap Belanja Daerah pada kabupaten/kota di pulau Sumatera. *Jurnal InFestasi*, Vol. 9 No. 2, Desember 2013. Hal 115-122.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi. Jakarta. Salemba Empat.
- Halim, A & Mujib. 2009. *Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat Dan Daerah*. Yogyakarta: UGM.
- Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. 2008. "Hubungan dan masalah keagenan di pemerintahan daerah: sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi". *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2(1). Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat. -----
2009. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kuncoro, Mudrajat. 2009. *Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah*. Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2012. "Akuntansi Sektor Publik". Yogyakarta: Andi.
- Maulida, A. d. 2011. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Kasus di 36 Kabupaten/Kota di Kalimantan)". *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol., No., hlm.
- Putro, Nugroho Suranto dan Sugeng Pamudji. 2010. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal". *Jurnal*.
- Rahmawati, Nur Indah. (2010). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja Daerah (studi pada pemerintah kabupaten/kota di jawa tengah)*. Skripsi Sarjana (dipublikasikan). Universitas Diponegoro Semarang.
- Ririn, Gurning. 2011. *Tugas Dana Alokasi Umum dan Laporan Realisasi Anggaran*. <http://www.edublogs.riringurning.com>. Diakses pada 4 januari 2013. Pukul 20.30.

- Soekarwo, 2003. Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah, Surabaya: Airlangga University Press.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Cetakan Pertama. Penerbit Ghalia Indonesia: Jakarta
- Setiawan, Anjar. 2010. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada Provinsi Jawa Tengah). Skripsi: Universitas Diponegoro Semarang.
- Siregar, Doli. D. 2004. Manajemen Aset. Jakarta: Gramedia.
- Sari, Noni Puspita dan Idhar Yahya. 2009. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja langsung pada Pemerintah/Kota di Provinsi Riau. Jurnal Akuntansi 42. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Sianturi, Simonsen. 2011. Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Keuangan Papua. Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Soemitro. 2008. Dasar-dasar Hukum Pajak Pendapatan, Jakarta. Salemba Empat.
- Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, CV Alfabeta, Bandung.
- Syaiful (2006). "Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan". Artikel.
- Sulistiyawan, Eko, 2009. "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera", [www.google.co.id](http://www.google.co.id)
- Sulistiyowati, Diah. 2011. "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal". Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro
- Syafrudin, Ateng. 2010. Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II Dan Pembangunannya. Jakarta : Rineka Cipta
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2009. Informasi Publik. Gramedia Widia Sarana Indonesia. Jakarta.
- Wahyuni dan Priyo Hari Adi. 2009. "Analisis Pertumbuhan Dan Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Daerah (Studi Pada 101 Kabupaten Se Jawa-Bali)". National Conference UKWMS Surabaya.